

Judul : Komisi V: keselamatan pelayaran masih lemah
Tanggal : Kamis, 06 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Marak Insiden Pelayaran Komisi V: Keselamatan Pelayaran Masih Lemah

FOTO: WES PKB



Syaiful Huda

WAKIL Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menyoroti berulangnya insiden yang merenggut banyak korban jiwa dan hilang dalam pelayaran. Itu jadi sinyal lemahnya tata kelola serta sistem keselamatan pelayaran di negara kepulauan dengan mobilitas laut yang tinggi.

Huda mengatakan, tingginya jumlah korban tewas dan hilang dalam insiden pelayaran merupakan hal yang tidak bisa ditoleransi. Banyaknya korban yang berjatuh dalam waktu berdekatan memperlihatkan adanya masalah fundamental pada manajemen keselamatan pelayaran nasional.

Untuk itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) perlu melakukan audit keselamatan menyeluruh armada kapal penumpang dan operator pelayaran nasional. Audit itu mencakup kelaikan kapal hingga validitas manifes. "Dari kasus KLM Nurul Salsa, ada data penumpang dari manifes 45 orang jadi 70 orang lebih," terangnya, Selasa (4/8/2026).

Dia mendorong Pemerintah untuk mencontoh praktik manajemen keselamatan pelayaran dari negara maju berbasis kepulauan. Seperti Jepang dengan Japan Coast Guard dan Selandia

Baru lewat Maritime New Zealand. Negara kepulauan itu menerapkan tiga pilar utama dalam menekan angka kecelakaan moda transportasi laut.

Pilar pertama mewajibkan seluruh sistem *e-ticketing* terintegrasi secara langsung dengan data kependudukan sebelum kapal diizinkan berlayar. Pilar kedua menekankan pelaksanaan audit kelaikan pelayaran tanpa toleransi. Pilar ketiga mencakup penyediaan peta risiko pelayaran berbasis cuaca serta navigasi digital terintegrasi antarinstansi secara menyeluruh.

Dia mengatakan, DPR akan memanggil Kemenhub dan pihak terkait untuk meminta evaluasi total atas rentetan musibah pelayaran nasional. Karena perlindungan keselamatan masyarakat dalam sistem transportasi laut harus terjamin. "Ini sekaligus jadi upaya nyata mengembalikan kepercayaan publik terhadap moda transportasi laut," tegasnya.

Ketua DPR Puan Maharani menambahkan, rentetan insiden dalam pelayaran harus jadi pengingat bahwa faktor keamanan transportasi laut nasional masih minim. Sejumlah kecelakaan kapal yang terjadi sejak awal tahun menunjukkan persoalan serius pada transportasi laut. Ukuran keberhasilan transportasi laut seharusnya dinilai dari keamanan masyarakat.

Dia menyoroti laporan dugaan kelalaian hingga manipulasi manifes saat insiden kecelakaan kapal. Ketidaksesuaian data manifes dengan jumlah penumpang yang sebenarnya merupakan persoalan berulang yang sering ditemukan. Karena itu, evaluasi mendalam perlu dilakukan untuk mencegah kejadian itu berulang pada masa yang akan datang. ■ PYB